# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan setiap individu dalam mengembangkan kemampuan diri agar mendapatkan kecerdasan untuk pengendalian diri, akhlak mulia dan keterampilan yang dibutuhkan lalu diterapkan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara (Nasution dkk., 2022). Pendidikan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kemajuan bangsa, sehingga diatur dalam Undang Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan itu penting dan menjadi hak yang wajib didapatkan setiap orang tanpa melihat latar belakang. Dalam membangun suatu negara diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksananya, hal tersebut dapat terealisasikan dengan pendidikan yang berkualitas juga (Ratnanengsih dkk. 2024). Dengan adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga adanya tujuan bangsa yang ingin dicapai, secara nasional pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka anak tidak sekolah dan angka anak putus sekolah di Indonesia.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan adalah urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti bahwa tidak hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas urusan pendidikan, tetapi juga pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menangani masalah pendidikan di daerah mereka. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas enam sub urusan pendidikan, menurut Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah

pusat memiliki otoritas total dalam hal pendidikan tinggi sedangkan Pemerintah provinsi dan Kab/Kota memiliki otoritas untuk mengatur pendidikan dasar, menengah, khusus, dan nonformal.

Di tingkat daerah, Kabupaten Gowa mengeluarkan kebijakan dalam bidang Pendidikan, yaitu Pendidikan Gratis yang dicanangkan pada tahun 2008. Namun dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah, salah satunya yaitu tidak berprestasinya peserta didik di sekolah. Dalam penelitian terdahulu (Saparuddin 2016) yang menyatakan bahwa program pendidikan gratis menyebabkan kurangnya motivasi dan minat belajar bagi peserta didik sehingga malas untuk pergi ke sekolah, yang menjadikan peserta didik tidak berprestasi dan tidak naik kelas atau tinggal kelas. Masalah tersebut kemudian menjadi penyebab anak berhenti sekolah sehingga mempengaruhi angka anak tidak sekolah dan angka anak putus sekolah di Kabupaten Gowa. Hal ini dibuktikan dengan penelitian (Haqiqi, 2018) yang menyatakan bahwa tidak naik kelas atau tinggal kelas adalah pengalaman yang menyakitkan bagi siswa, pengalaman tersebut menyebabkan siswa menjadi malu untuk mengulang di kelas yang lama dengan teman baru yang usianya berada di bawahnya, sehingga karena hal tersebut anak lebih memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya.

Dalam masa jabatannya sebagai Bupati, Bapak Ichsan Yasin Limpo melalui Dinas Pendidikan di Kabupaten Gowa membuat kebijakan pendidikan yaitu Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang selanjutnya disebut SKTB, kebijakan SKTB ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Dalam Peraturan tersebut SKTB merupakan pendekatan pendidikan yang berlandaskan pada prinsip pembelajaran tuntas dan berkesinambungan dengan proses belajar siswa tanpa hambatan administratif seperti tinggal kelas. Dalam sistem ini, seluruh siswa dipastikan naik kelas setiap tahun ajaran, dengan catatan bahwa sekolah wajib menyediakan program

remedial bagi siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kebijakan SKTB disosialisasikan pada tahun 2011 dan dilaksanakan pada tahun 2013 disemua sekolah tingkatan SD, dan SMP di Kabupaten Gowa. Kebijakan ini dibuat berdasarkan pertimbangan untuk memajukan kualitas pendidikan dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

**Tabel 1**
Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2024

| No. | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontonompo | 22.522 | 23.887 | 46.409 |
| 2. | Bajeng | 37.417 | 37.928 | 75.345 |
| 3. | Pallangga | 65.351 | 66.713 | 132.064 |
| 4. | Somba Opu | 77.305 | 78.793 | 156.098 |
| 5. | Bontomarannu | 22.091 | 22.514 | 44.605 |
| 6. | Parang Loe | 9.704 | 9.873 | 19.577 |
| 7. | Tinggi Moncong | 11.875 | 11.792 | 23.667 |
| 8. | Bungaya | 9.101 | 9.364 | 18.465 |
| 9. | Tompobulu | 15.185 | 15.474 | 30.659 |
| 10. | Barombong | 23.144 | 23.576 | 46.720 |
| 11. | Biring Bulu | 16.328 | 16.671 | 32.999 |
| 12. | Tombolo Pao | 15.849 | 15.247 | 31.096 |
| 13. | Manuju | 8.010 | 8.056 | 16.066 |
| 14. | Bontolempangan | 8.462 | 8.580 | 17.042 |
| 15. | Pattallassang | 17.197 | 17.371 | 34.568 |
| 16. | Bontonompo Selatan | 15.736 | 16.587 | 32.323 |
| 17. | Parigi | 6.825 | 7.207 | 14.032 |
| 18. | Bajeng Barat | 14.028 | 14.236 | 28.264 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupetan Gowa

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu menjadi salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di

Kabupaten Gowa mencapai 156.098 total penduduk, dengan jumlah penduduk usia sekolah (7-15) tahun yang cukup besar, yaitu 23.000 anak. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menunjukkan angka kelulusan tingkat SD dan SMP di Kecamatan Somba Opu mencapai hampir 100% pada tahun ajaran 2023/2024, yang tidak sejalan dengan capaian kemampuan literasi murid. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa 53,42% siswa SD dan 40% siswa SMP di Kecamatan Somba Opu berada di bawah level minimum dalam literasi membaca dan lebih dari 55% siswa tingkat SD dan SMP mengalami kesulitan dalam numerisasi dasar. Hal tersebut menunjukkan adanya *GAP* yang cukup besar antara presentasi kelulusan dengan capaian akademik riil siswa di Kecamatan Somba Opu.

Kesenjangan tersebut kemudian selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mujizatullah 2018) yang menyatakan bahwa penerapan SKTB yang tidak mengenal tinggal kelas atau kenaikan kelas secara otomatis dapat mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan, penurunan minat siswa dalam belajar, terutama bagi siswa yang sudah malas, dan penurunan keinginan mereka untuk rajin ke sekolah karena sudah tertanam dalam pikiran mereka bahwa ada jaminan bahwa mereka akan tetap naik kelas. Selain itu, penelitian oleh Mulya S (2015) mengemukakan bahwa masih terdapat guru yang sering terlambat menyusun Rencana Penyusunan Pembelajaran (RPP), sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat media dan bahan ajar yang baik. Selain itu, pemahaman guru tentang kebijakan SKTB berbeda-beda di setiap sekolah, yang menyebabkan mereka tidak siap untuk proses belajar, yang berdampak pada kualitas siswa karena guru tidak mempersiapkan bahan ajar dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis ingin melakukan penelitian untuk mengidentifikasi lebih dalam terkait implementasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kecamatan Somba Opu, yang nantinya

akan dibuatkan beberapa rekomendasi kebijakan melalui skripsi karya *policy brief* dengan judul **"*Policy Brief* Implementasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan Tingkat SD Dan SMP di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan Tingkat SD dan SMP di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan Tingkat SD dan SMP di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan terkait pencegahan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah pada penelitian mendatang.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu pemerintah Kabupaten Gowa dalam menciptakan dan mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih baik dan efektif dalam mencapai tujuan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.